



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DUKUNGAN KABINET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : THANON ARIA DEWANGGA
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
3. NHK : 163132

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 8.472.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m2/280 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 8.335.000.000
2. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 27.000.000
3. Tanah Seluas 492 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 75.000.000
4. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 35.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 300.000.000

1. MOBIL, MG SUV Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.787.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.238.621.950

F. HARTA LAINNYA Rp. 4.166.851.902

Sub Total Rp. 16.965.273.852

III. HUTANG Rp. 13.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 16.952.273.852

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.